



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

STRATEGI PELAKSANAAN

ARAH KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PPID KEMENTERIAN PANRB 2025-2026

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

@2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Strategi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik PPID Kementerian PANRB Tahun 2025-2026, dapat tersusun dengan baik.

Di tengah arus informasi yang sangat deras, keterbukaan informasi publik menjadi semakin krusial. PPID sebagai ujung tombak dalam mewujudkan hal ini memiliki peran yang sangat strategis. Kata pengantar ini bertujuan untuk menggarisbawahi pentingnya PPID dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, meningkatkan akuntabilitas penyelenggara negara, serta memperkuat fondasi masyarakat informasi yang cerdas dan kritis. Dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks, akses terhadap informasi yang akurat dan relevan menjadi kebutuhan dasar. PPID telah memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan ideal dari keterbukaan informasi publik.

Kami berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran PPID dalam mewujudkan masyarakat informasi. Selain itu, kami juga ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama berkomitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang lebih baik.

Jakarta, Februari 2025
Atasan PPID,
Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama

TTD
Reni Suzana



I. PENDAHULUAN

Di era digital yang ditandai dengan derasnya arus informasi, keterbukaan informasi publik menjadi semakin krusial. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menjadi tonggak sejarah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Komisi Informasi dan Badan Publik (PPID) sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut memiliki peran yang sangat strategis dalam memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi publik.

Namun demikian, implementasi UU KIP masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan haknya untuk memperoleh informasi, serta belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia di PPID. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru bagi PPID untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, misalnya melalui pengembangan portal informasi yang interaktif dan mudah diakses. Dalam konteks masyarakat informasi yang terus berkembang, keterbukaan informasi publik bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu. Dengan akses yang lebih luas terhadap informasi, masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, serta ikut serta dalam proses pembangunan.



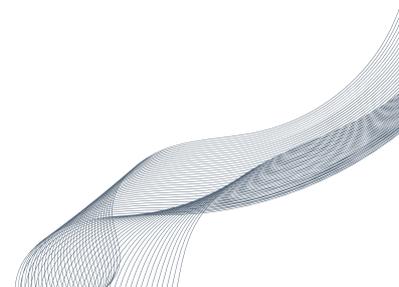
II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Strategi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik PPID Kementerian PANRB Tahun 2025 - 2026, yaitu:

1. Mengevaluasi Implementasi UU KIP: Melakukan penilaian komprehensif terhadap sejauh mana Kementerian PANRB telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya dalam konteks penyediaan dan pengelolaan informasi publik.
2. Mengidentifikasi Tantangan dan Peluang: Mengidentifikasi kendala, hambatan, dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan PPID di lingkungan Kementerian PANRB, baik dari aspek internal maupun eksternal.
3. Merumuskan Strategi Pengembangan: Menyusun strategi yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PPID dalam mendukung terbentuknya masyarakat informasi yang berbasis pengetahuan.
4. Menyusun Peta Jalan: Merancang peta jalan pelaksanaan PPID untuk tahun 2024 yang mencakup target, indikator kinerja, dan rencana aksi yang konkret.
5. Meningkatkan Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian PANRB.
6. Memperkuat Koordinasi dan Kolaborasi: Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian PANRB serta dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan PPID.

Tujuan dari penyusunan Strategi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik PPID Kementerian PANRB Tahun 2025 - 2026:

1. Mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan PPID Kementerian PANRB telah mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi.
3. Merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PPID.
4. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi.



III. VISI, MISI & BERAKHLAK

VISI :

Menjadi tempat khusus Pelayanan Informasi yang Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif)

MISI :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang transparan dan akuntabel, sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Memberikan Pelayanan Informasi yang Komunikatif, Responsif, Proaktif, Terintegratif, dan Informatif terkait kebijakan, program, dan kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Memfasilitasi pelayanan informasi publik yang ditujukan ke unit kerja di lingkungan Kementerian PANRB (online dan non-online).

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BERAKHLAK dalam Memberikan pelayanan informasi publik, yang bermakna bahwa:

1. Komunikatif dengan stakeholders yang datang atau berkomunikasi dengan petugas,
2. Responsif dalam memberikan tanggapan yaitu tanggapan diberikan secara cepat, tepat, dan tanggap,
3. Proaktif dalam penyelesaian persoalan yaitu mendorong unit terkait dengan konten informasi agar segera melengkapi data dan informasi sesuai yang diminta pemohon ataupun pelapor,
4. Integratif dalam penyelenggaraan Pelayanan yaitu layanan informasi dan pengaduan terpusat di PPID,
5. Edukatif yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat atau stakeholder serta memberikan informasi yang benar dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan sentuhan hati dalam melayani.

IV. STRATEGI PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN PANRB

STRATEGI INTI

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM):
2. Pelatihan Berkelanjutan: Melaksanakan pelatihan secara berkala bagi seluruh pegawai, terutama PPID, terkait regulasi KIP, teknik penyusunan informasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Sertifikasi Kompetensi: Memberikan sertifikasi kepada pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi dalam pengelolaan informasi publik.
4. Rotasi Tugas: Melakukan rotasi tugas pegawai untuk memperluas pemahaman dan pengalaman dalam bidang keterbukaan informasi.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

1. Portal Informasi Terintegrasi: Membangun portal informasi yang komprehensif, mudah diakses, dan user-friendly, serta terintegrasi dengan sistem informasi lainnya.
2. Aplikasi Mobile: Mengembangkan aplikasi mobile untuk mempermudah akses informasi publik bagi masyarakat.
3. Standarisasi Format Data: Menetapkan standar format data yang seragam untuk memudahkan pencarian, pengolahan, dan penyebarluasan informasi.

SOSIALISASI DAN EDUKASI

1. Kampanye Keterbukaan Informasi: Melakukan kampanye secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak atas informasi dan pentingnya keterbukaan informasi.
2. Sosialisasi ke Internal: Melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh pegawai tentang pentingnya keterbukaan informasi dan tata cara penyampaian informasi.
3. Kerjasama dengan Media: Membangun kerjasama dengan media massa untuk mensosialisasikan kebijakan dan program keterbukaan informasi.



IV. STRATEGI PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN PANRB

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Kanal Pengaduan: Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsif bagi masyarakat yang merasa hak atas informasinya tidak terpenuhi.
2. Forum Diskusi: Memfasilitasi forum diskusi antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas isu-isu terkait keterbukaan informasi.
3. Keterlibatan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan: Melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi.

EVALUASI DAN MONITORING

1. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan PPID untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi.
2. Mengadakan Rapat Monev Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Pengaduan bersama Unit Kerja terkait pengelolaan PPID, Pelayanan Informasi dan Pengaduan.
3. Laporan Kinerja: Menyusun laporan kinerja PPID seperti Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik secara transparan dan akuntabel.

TANTANGAN DAN SOLUSI

- Tantangan: Kurangnya kesadaran pegawai, keterbatasan anggaran, dan resistensi terhadap perubahan.
- Solusi: Meningkatkan kesadaran melalui pelatihan dan sosialisasi, mengoptimalkan anggaran yang ada, dan melibatkan pimpinan dalam mendukung pelaksanaan PPID.





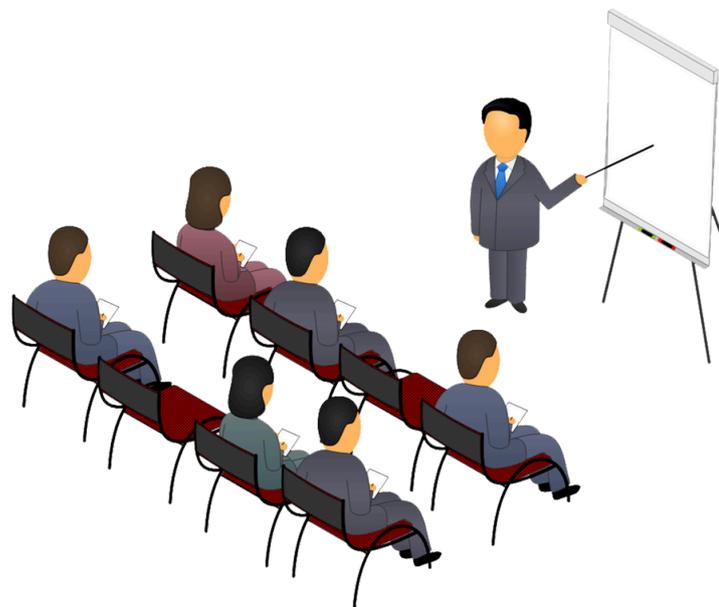
INDIKATOR KEBERHASILAN



- Meningkatnya jumlah permohonan informasi: Menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan memanfaatkan layanan informasi yang disediakan.
- Meningkatnya kepuasan masyarakat: Hasil survei menunjukkan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi.
- Meningkatnya indeks keterbukaan informasi: Hasil penilaian terhadap pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan peningkatan skor.
- Meningkatnya penggunaan portal PPID: Terjadi peningkatan jumlah pengunjung dan interaksi pengguna pada portal informasi.

important

Perlunya penyesuaian kondisi dan kebutuhan instansi.
Penting untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi.



VI. RINGKASAN



Pelayanan informasi publik adalah proses penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan Kebijakan

- ✓ **Meningkatkan Transparansi:** Memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat.
- ✓ **Partisipasi Aktif:** Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
- ✓ **Akuntabilitas Publik:** Memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas informasi yang disediakan.

Langkah strategis

- ✓ **Pemetaan Kebutuhan Informasi:** Mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
- ✓ **Pengembangan Platform Digital:** Membangun dan memelihara website dan aplikasi untuk akses informasi.
- ✓ **Sosialisasi dan Edukasi:** Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mendapatkan informasi.
- ✓ **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pelayanan

Peran Stakeholder

Kementerian PANRB	Masyarakat	Media
Pengelola informasi dan kebijakan	Pengguna informasi yang aktif dan kritis	Penyebarnya informasi kepada publik

Prinsip utama

- ✓ **Aksesibilitas** : Informasi mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
- ✓ **Keterbukaan** : Semua informasi publik disajikan dengan jelas dan terbuka.
- ✓ **Relevansi** : Informasi yang disediakan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Indikator Keberhasilan

- ✓ **Tingkat Akses Informasi:** Meningkatnya jumlah pengunjung website dan pengguna aplikasi.
- ✓ **Survei Kepuasan:** Hasil survei yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi.
- ✓ **Partisipasi Publik:** Jumlah partisipasi dalam forum-forum atau diskusi publik.

V. PENUTUP

Strategi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian PANRB Tahun 2025-2026 disusun untuk memberikan penjelasan atas upaya PPID dalam menyajikan informasi publik yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan berpedoman Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

Strategi diterapkan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam mengakses informasi yang efektif dan efisien. Dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang sudah masuk ke masyarakat informasi, PPID perlu menyesuaikan diri agar tetap dapat memberikan informasi yang up to date dan mudah diakses.

Adapun beberapa hal dalam pengelolaan PPID masih banyak yang perlu dibenahi, dengan strategi ini kami berharap agar dapat terus dilakukan perbaikan demi kemajuan PPID Kementerian PANRB. Semoga strategi ini dapat menjadi landasan yang berharga untuk perbaikan berkelanjutan yang berdampak bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Kementerian PANRB.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**PPID KEMENTERIAN PANRB
@2025**